

MEMPERKUAT SEKTOR UKM DALAM MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

POLICY BRIEF - ASEAN STUDIES CENTER UGM

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015 yang akan berimplikasi pada pembukaan pasar regional yang lebih luas berdampak baik positif maupun negatif terhadap UKM. Secara positif, MEA dimaknai sebagai akses terhadap pasar yang lebih luas, skala ekonomi yang lebih efisien dan terbukanya sumber-sumber terhadap bahan baku. Namun tanpa persiapan yang matang, produk-produk UKM lokal akan tergerus dengan barang impor mengingat kesamaan produk yg diperdagangkan di level regional.

UKM perlu diperkuat dengan pemahaman yang matang dan konkret mengenai MEA, tidak hanya dari sisi makro namun solusi konkret dan praktis tentang bagaimana UKM harus merespon MEA. Pemerintah daerah juga menjadi ujung tombak penguatan kapasitas UKM tersebut dengan misalnya membentuk pusat-pusat informasi yang membantu UKM menghadapi MEA dari sisi standarisasi produk, hak kekayaan intelektual maupun prosedur ekspor. Dari sisi modal, UKM harus didorong untuk dapat memenuhi persyaratan fasilitas pinjaman sekaligus memperkenalkan akses alternatif seperti jasa keuangan ventura dan lembaga keuangan mikro. Tidak hanya itu, adopsi UKM terhadap pemanfaatan teknologi harus terus didorong mengingat rendahnya pemanfaatan teknologi informasi di kalangan UKM.

URGENSI PENGUATAN SEKTOR UKM

Di Indonesia, UKM memiliki peran yang sangat penting. Urata (2000) yang telah mengamati perkembangan UKM di Indonesia menegaskan bahwa UKM memainkan beberapa peran penting di Indonesia. Beberapa perannya yaitu (1) Penyedia kesempatan kerja (2) Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat (3) Pencipta pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan sensitivitasnya serta keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan (4) Memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor non migas. Sementara itu, UKM mereduksi ketimpangan pendapatan (*reducing income inequality*).

Data perkembangan UKM dan Usaha Besar (UB) di Indonesia tahun 2011-2012 yang dirilis oleh Kementerian

Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa peran UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar yaitu 97,24% (2011) dan 97,16% (2012). Meskipun komposisi terbesar adalah tenaga kerja pada usaha mikro, akan tetapi peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja tetap lebih besar dibandingkan Usaha Besar (UB).

Kemudian kontribusi UKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak bisa diremehkan. Dari sekitar 99% unit usaha, sektor UKM mampu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB sebesar 58-59% selama periode 2011-2012. Meskipun pencapaian tersebut tidak seproduktif pencapaian UB yang, sekalipun, jumlahnya hanya kurang dari 1% tetapi berhasil memberi kontribusi terhadap pembentukan PDB sekitar 40%. Tetapi peran UKM dalam postur perekonomian nasional cukup penting dan tidak bisa diremehkan. Apalagi ketika peran tersebut dikaitkan dengan upaya pengurangan kemiskinan. Eksistensi UKM yang terdesiminasi lebih masif di kalangan masyarakat membuat UKM dapat diandalkan sebagai kanal solutif bagi upaya pengentasan kemiskinan.

Data yang sama menunjukkan kontribusi UKM terhadap ekspor cukup tertinggal dibandingkan dengan UB. Kontribusi UKM dalam neraca ekspor non-migas Indonesia selama tahun 2011 hanya 16,44%. Bahkan di tahun 2012, capaian tersebut sedikit terkoreksi hingga menyentuh level 14,06%. Bandingkan dengan sumbangsih UB dalam total ekspor non-migas Indonesia tahun 2011 yang mencapai angka 83,56%. Bahkan setahun kemudian, kontribusi UB terhadap ekspor non-migas Indonesia mengalami pertumbuhan menjadi 85,94%.

Sekalipun hasil kalkulasi menunjukkan determinasi UB jauh lebih signifikan dibanding UKM, namun hal tersebut belum tentu berkorelasi positif terhadap pemerataan pembangunan ekonomi. Sebab segmentasi pengusaha di kalangan UB relatif hanya terpusat pada sebagian kalangan elite ekonomi. Bandingkan dengan segmentasi pelaku usaha dari kalangan UKM yang persebarannya relatif lebih merata sehingga bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.

UKM DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), UKM perlu mempersiapkan diri untuk terlibat dalam proses produksi yang lebih luas. Salah satunya agar mampu berkontribusi dalam proses rantai produksi skala regional. Diskusi yang dilakukan oleh The Asia Foundation dengan UKM dan para pakar ekonomi regional di Bangkok tahun 2014 lalu mengisyaratkan integrasi ekonomi regional dapat memberikan manfaat pada UKM melalui terbukanya akses untuk bahan baku yang lebih luas, skala ekonomi yang lebih efisien dan potensi peningkatan permintaan. Untuk itu, syarat utama bagi UKM dalam menghadapi MEA adalah memperkuat UKM dengan informasi yang konkret mengenai isu krusial pembentukan Komunitas ASEAN, termasuk diantaranya pemahaman mengenai konsep pasar tunggal dan proses produksi regional.

Hanya saja tidak seperti ekspektasi umum, kajian Tambunan (2013) menjelaskan perdagangan bebas regional seperti MEA memiliki dua mata pisau berupa peluang sekaligus tantangan bagi UKM. Tambunan memetakan kedua sisi tersebut sebagai berikut:

- Pembukaan pasar regional dapat mempertajam kompetisi di tingkat lokal. Hilangnya hambatan-hambatan perdagangan memberikan insentif bagi produk non-domestik untuk masuk.
- Tanpa hambatan perdagangan yang berarti, pelaku ekonomi akan menikmati penurunan biaya produksi apabila bahan baku yang digunakan adalah produk impor.
- Penghapusan tarif dan hambatan non-tarif memberikan insentif ekspor. Ekspor idealnya meningkat seiring dengan proses perdagangan bebas.
- Peningkatan ekspor akan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan bahan baku lokal dalam jangka panjang. Bahan baku akan semakin sulit dicari apabila tidak ada larangan ekspor bahan baku tanpa nilai tambah.

Tidak banyak studi yang menguji secara empiris efek perdagangan bebas terhadap eksistensi UKM terutama di Indonesia. Tybout (2000) dalam Tambunan menjelaskan efek meningkatnya penetrasi impor dan berkurangnya hambatan domestik berkorelasi positif dengan mengecilnya skala pelaku ekonomi lokal. Tewari (2001) dalam Tambunan (2013) dalam studi yang dilakukan di Tamil Nadu, India menemukan fenomena yang sama. Industri tekstil lokal mengecil secara signifikan pasca diberlakukannya perdagangan bebas. Di tempat yang sama, Tewari dan Goebel (2002) dalam Tambunan (2013) melihat dua efek sekaligus yakni efek positif dan negatif. Beberapa UKM berkinerja baik, namun banyak pula yang

menunjukkan efek sebaliknya. UKM yang berbasis di perkotaan akan mengalami penyusutan skala karena paparan barang impor yang lebih cepat dibandingkan dengan UKM berbasis pedesaan.

Fenomena tersebut menunjukkan kendatipun UKM menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara, sektor ekonomi tersebut pula yang paling berpotensi terhadap dampak kompetisi. Namun dalam tradisinya, walaupun UKM memiliki kapasitas dan kesiapan yang belum sebanding dengan perusahaan besar, UKM memiliki fleksibilitas terhadap perubahan (Salavou, 2004 dalam Gunakaseran, 2011). Agar tetap kompetitif UKM harus beradaptasi dengan perubahan baik dengan strategi baru maupun bersiap dengan memperkuat pemanfaatan teknologi, kata kunci dari penguatan sektor UKM ini adalah daya saing. Policy Brief ini akan melihat kesiapan UKM dalam beberapa kondisi eksisting UKM dilihat dari pemahaman UKM terhadap MEA, akses modal, pemanfaatan teknologi informasi dan jangkauan pemasaran produk.

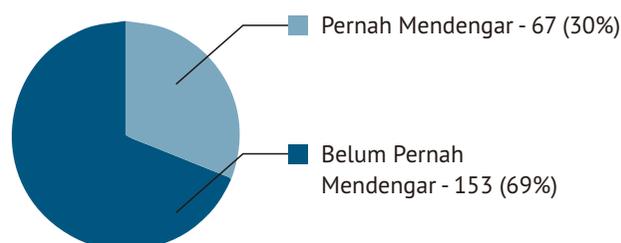
KONDISI EKSISTING UKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

ASEAN Studies Center FISIPOL UGM telah melakukan studi terhadap 410 UKM di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fokus studi tersebut utamanya pada UKM yang berbasis pada produk pangan dan pakaian jadi. Kedua fokus tersebut ditentukan dengan melihat RCA (Revealed Comparative Advantage) produk-produk Indonesia di tingkat regional dan kesamaan produk yang diperdagangkan di antara negara-negara ASEAN.

Pemahaman UKM Terhadap Komunitas ASEAN

Kendatipun pemerintah telah memasyarakatkan MEA melalui berbagai media, masih banyak UKM yang belum mendengar mengenai MEA (Tabel 1). Dari 410 responden yang diwawancarai pada bulan juni lalu hanya 30% yang pernah mendengar mengenai MEA. Itu artinya sebagian besar UKM belum terekspos terhadap isu-isu pemberlakuan MEA.

Diagram 1. Pengetahuan UKM Mengenai Pemberlakuan MEA



Lemahnya sosialisasi ini disebabkan karena program yang

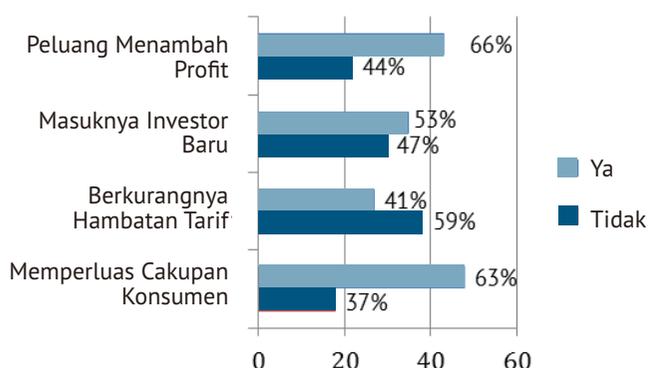
dilakukan oleh instansi pemerintah masih terfokus pada UKM yang memiliki basis pasar ekspor. Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan instansi terkait UKM di DIY terungkap bahwa instansi pemerintah masih memandang MEA dari sisi peluang ekspor ketimbang potensi negative spillover effect. Potensi ini akan muncul ketika barang sejenis masuk dan ditawarkan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang lebih baik sehingga mendistraksi eksistensi UKM lokal.

Di sisi lain, konten program sosialisasi yang telah dilakukan umumnya masih dalam konteks makro. UKM di daerah banyak memberikan masukan dalam hal tersebut. Mereka menginginkan sosialisasi yang lebih bersifat praktis, memberikan solusi konkret mengenai apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Disamping itu, UKM juga memerlukan gambaran utuh mengenai bagaimana MEA mempengaruhi produknya.

Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand, pemerintah di negara tersebut telah membangun pusat-pusat informasi mengenai ASEAN di pelosok daerah. UKM yang ingin mengetahui perkembangan pasar, prosedur dan standardisasi produk dapat mengakses pusat informasi tersebut dengan mudah.

Lebih lanjut UKM yang memahami MEA telah melihat perubahan lansekap ekonomi tersebut sebagai sebuah peluang. Peluang diyakini sebagai kesempatan untuk menambah keuntungan, masuknya investor baru dan cakupan konsumen dengan pasar yang lebih luas. Namun UKM belum melihat MEA sebagai kemudahan dalam hal berkurangnya hambatan tarif. UKM masih melihat adanya *enabling environment* di level domestik yang belum bekerja dengan baik kendatipun tarif telah dihapus. Kurangnya infrastruktur, masih maraknya pungli dan ketidakpastian prosedur ekspor membuat tarif yang nol menjadi sulit untuk menjadi insentif.

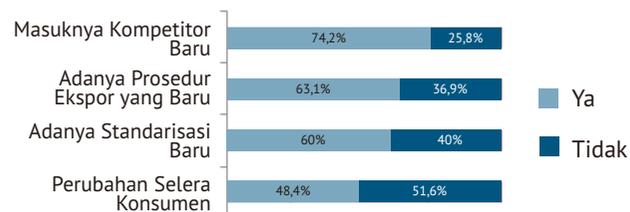
Diagram 2. Perspektif UKM terhadap peluang MEA



Dari sisi tantangan, UKM memandang pemberlakuan MEA menghadirkan pekerjaan baru seperti adanya standardisasi produk, prosedur ekspor dan masuknya kompetitor baru. Akan tetapi 53% dari pelaku UKM tidak

melihat adanya perubahan selera konsumen. Hal ini disebabkan oleh konten-konten dan kekhasan lokal yang dimiliki oleh produk-produk di Yogyakarta. Perajin batik tulis misalnya merasa tidak terancam dengan adanya batik cetak asing yang lebih murah. Mereka merasa memiliki segmentasi pasar tersendiri, begitu pula dengan pengrajin makanan tradisional.

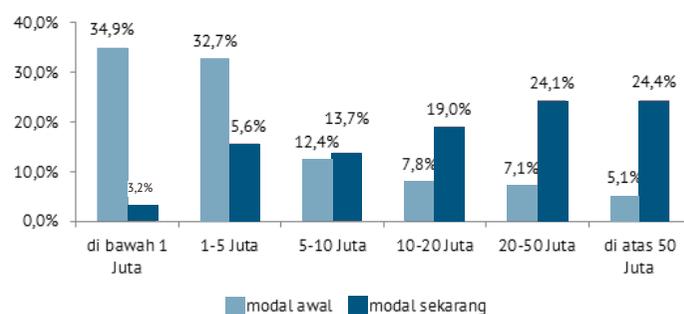
Diagram 3. Perspektif UKM Terhadap Tantangan MEA



Akses UKM Terhadap Modal

Dari segi kepemilikan modal, UKM di Yogyakarta menikmati periode pertumbuhan yang cukup masif. Terlihat dalam tabel 2 bahwa UKM yang sebagian besar memiliki modal di bawah satu juta rupiah di awal pendiriannya kini telah bergerak ke sisi sebelah kanan yang berarti modal yang lebih besar.

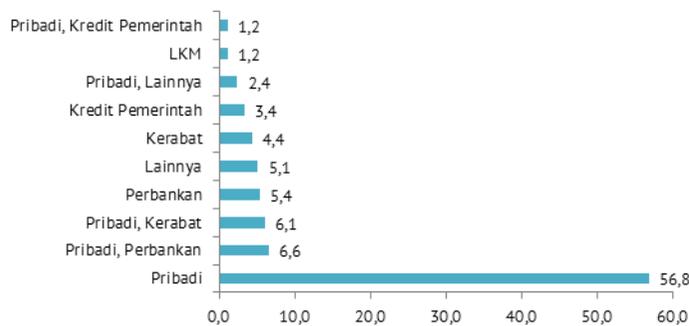
Diagram 4. Perkembangan Modal UKM



Kendatipun modal UKM berkembang dari waktu ke waktu, tidak banyak UKM yang benar-benar mengakses modal dari institusi keuangan formal saat mereka menginisiasi usaha. Tabel 3 menunjukkan 56,8% responden memperoleh modal awal dari sumber-sumber pribadi seperti simpanan maupun aset. Kesulitan UKM level start-up ini menyiratkan kondisi bahwa banyak UKM yang belum bankable dari sisi persyaratan pengajuan pinjaman.

UKM tidak juga menyadari adanya lembaga keuangan non perbankan seperti lembaga keuangan mikro ataupun modal ventura sebagai alternatif sumber pembiayaan. Di modal ventura misalnya UKM dapat mengakses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih mudah ditambah dengan fasilitas pembinaan.

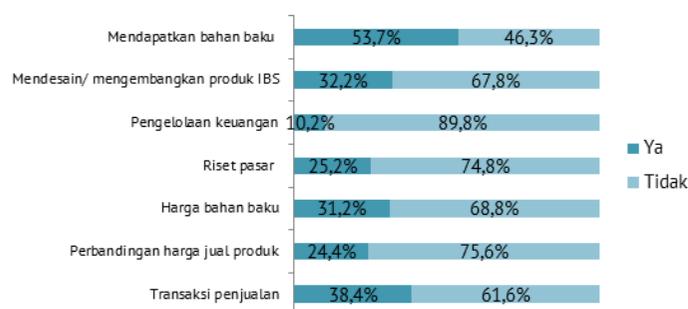
Diagram 5. Sumber Modal Awal



Adopsi Teknologi Informasi Pada UKM

Adopsi teknologi informasi pada UKM yang diteliti menunjukkan trend yang tidak cukup menggembirakan. Di beberapa aspek tujuan penggunaan teknologi informasi seperti informasi untuk memperoleh bahan baku, desain produk, riset pasar, perbandingan harga produk hingga transaksi sebagian besar responden belum terekspos dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Diagram 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada UKM



IMPLIKASI KEBIJAKAN

Policy brief ini disusun dari perkembangan studi yang masih berjalan sejak bulan Juni 2014. Melihat kondisi empiris di lapangan dapat disimpulkan beberapa implikasi kebijakan yang perlu segera direspon oleh pemerintah sebagai regulator maupun pelaksana kebijakan:

- Sosialisasi secara masif perlu dilakukan, terutama oleh instansi di level daerah agar jangkauan informasi mampu mencapai UKM yang tidak hanya berbasis perkotaan namun juga pedesaan.

- Sosialisasi mengenai MEA sebaiknya dilengkapi dengan pemberian informasi yang konkret mengenai rekomendasi strategi ataupun rencana aksi yang dapat dipraktekkan oleh UKM. Dalam hal ini, pusat-pusat informasi mengenai aturan main, hak kekayaan intelektual, peta pemasaran dan standardisasi produk untuk level regional ASEAN perlu dibentuk.
- Kendatipun hambatan-hambatan tarif dan non-tarif perdagangan telah dikurangi secara bertahap dalam lingkup regional, pelaku ekonomi belum melihat manfaat sepenuhnya akan hal tersebut. Enabling environment seperti ketersediaan infrastruktur dankepastian hukum bagi para pelaku usahaperlu segera dibenahi.
- Dari segi permodalan, UKM banyak mengalami permasalahan administratif sehingga mereka tidak terakses pinjaman dari lembaga keuangan formal. Pemerintah perlu mendorong UKM untuk dapat memformalisasi aspek-aspek pengelolaan maupun asetnya.
- *Local content* menjadi keunggulan produk-produk di daerah ketika produk impor mulai membanjiri pasar lokal akibat adanya perdagangan bebas. Hal ini diyakini oleh sejumlah pelaku UKM. Implikasi dari perspektif tersebut adalah pemerintah perlu merancang strategi untuk dapat mendorong produk makanan dan pakaian jadi untuk lebih inovatif dalam merancang produk mereka sehingga memiliki kekhasan.
- Mendorong pemasaran produk-produk UKM melalui jejaring pemasaran berbasis web maupun e-commerce.

Referensi

- Gunasekaran, Angappa, Rai Bharatendra, & Griffin, Michael. 2011. Resilience and Competitiveness of Small and Medium Enterprises: An Empirical Research. International Journal of Production Research Vol 49, No 18.
- Tambunan, Tulus. 2013. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan bagi UMKM Indonesia (Policy Paper).
- Urata, Shujiro (2000), Policy Recommendation for SME Promotion in the Republic of Indonesia, JICA, Tokyo.